BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September atau Gestapu pada tahun 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) ditandai dengan terbunuhnya enam jenderal Angkatan Darat dan seorang perwira muda. Ketika ABRI, khususnya Angkatan Darat mengetahui bahwa terdapat pimpinan mereka yang terbunuh, dan menyadari bahwa terdapat panglima daerah yang menjadi korban, maka rasa dendam yang mendalam dirasakan oleh anggota Angkatan Darat dan menjadi alasan Angkatan Darat semakin tampil sebagai kekuatan yang enggan untuk ditandingi (Abdullah, 2012). Kemarahan tentara di Angkatan Darat muncul disebabkan jiwa korsa yang dimiliki oleh tantara pada umumnya.

Letnan Jenderal Ahmad Yani yang menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi (KOTI) menjadi salah satu korban pembunuhan yang dilakukan anggota PKI pada G. 30S, sehingga pada tanggal 14 Oktober 1965 Soeharto ditunjuk menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) oleh Soekarno untuk menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang kemudian dilantik pada tanggal 17 Oktober 1965. Pasca pelantikannya, Soeharto menyampaikan pengumuman resmi kepada seluruh personel Angkatan Darat bahwa PKI merupakan dalang peristiwa G30S dan pengkhianat bangsa. Soeharto juga menyampaikan bahwa tanggal 1 Oktober merupakan hari ketika G. 30S dihancurkan dan menjadi peringatan Hari

Kesaktian Pancasila (Antara,2017). Hari tersebut diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia serta Angkatan Darat khususnya.

Sepuluh hari setelah enam jenderal Angkatan Darat terbunuh pada peristiwa Gerakan 30 September stabilitas negara menghadapi situasi yang sangat serius. Keadaan sosial politik negara kacau dan berdampak pada kemunduran kreatifitas masyarakat, bangsa dan negara yang menjadi syarat utama bagi keberlangsungan pembangunan nasional Indonesia. Kemajuan pembangunan nasional menjadi penting karena hal itu menjadi alat utama pemerintah untuk melakukan kontrol politik dan keamanan pada kehidupan masyarakat sipil, terutama pada kelompok pengikut PKI yang menjadi dalang dari perisitiwa gerakan dimaksud. Demi mencapai tujuan tersebut Mayor Jenderal Soeharto membentuk dan memimpin satu badan yang dapat menjamin kepentingan itu, yaitu KOPKAMTIB pada 10 Oktober 1965.

Inisiatif Soeharto mendapat persetujuan Soekarno, maka terbitlah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 179/KOTI/1965 dengan tujuan utama untuk memulihkan keamanan dan ketertiban yang mengalami gangguan serius akibat peristiwa pemberontakan G. 30S (Crouch,1999). Pemulihan keamanan dan ketertiban menjadi prioritas utama dan mendesak, terutama karena dipandang dapat membahayakan ideologi Pancasila serta keamanan dan ketertiban di masyarakat, yang pada gilirannya dapat membahayakan dan mengancam keberadaan negara Indonesia.

KOPKAMTIB merupakan hasil kompromi politik yang dicapai antara Soekarno dan Soeharto di pagi hari sesudah percobaan kudeta, pada Oktober 1965.

Dalam kompromi tersebut Soeharto bersedia mengambil alih kepemimpinan di tubuh Angkatan Darat dengan syarat diserahi tugas dan sekaligus memiliki kewenangan untuk melakukan segala tindakan pemulihan yang dipandang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban sosial politik negara. Keutamaan KOPKAMTIB dibandingkan organisasi keamanan lainnya ialah fungsinya menyebar keseluruh elemen masyarakat Indonesia. Para komando militer maupun pejabat eksekutif setiap daerah diberi kewenangan menggunakan kekuasaan KOPKAMTIB untuk menangkap dan menahan siapapun tanpa persidangan (Kasenda, 2013).

Soeharto menempatkan tokoh-tokoh militer kepercayaanya dalam KOPKAMTIB. Salah satunya ialah Laksamana Soedomo, Karir Soedomo dalam KOPKAMTIB berawal dari tahun 1973 sebagai Wakil Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban kemudian menjadi KASKOPKAMTIB tahun 1974 sebelum pada akhirnya diangkat menjadi Panglima KOPKAMTIB pada tahun 1978 hingga 1983, yang merupakan Panglima KOPKAMTIB keempat setelah Jendral Soemitro Sastrodiharjo diberhentikan oleh Presiden Soeharto (Samendawai, 2020).

Soedomo adalah satu-satunya perwira tinggi Angkatan Laut yang menduduki posisi penting hampir sepanjang sejarah Orde Baru, dari petinggi KOPKAMTIB, Wakil Panglima ABRI, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (MenkoPolkam), hingga Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Karier politiknya berakhir seiring dengan tumbangnya Orde Baru pada 1998 (Said,2016). Bagi Soedomo mewujutkan

stabilitas dalam pembangunan di awal era Orde Baru bukan merupakan hal yang mudah, banyak persoalan keamanan, ekonomi, politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan Orde Baru yang didukung oleh militer dan teknokrat mengambil langkah strategis agar dapat mewujudkan kestabilan keamanan nasional. Salah satunya adalah dengan *Security Approach* atau pendekatan keamanan. Yang penulis maksud dari *Security Approach* disini adalah kebijakan yang mengkedepankan aspek keamanan yang melibatkan militer dan aparat negara (Fathegipon, 2016).

Pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintahah Orde Baru menyebabkanmedia dan pers di bawah kontrol yang ketat pemerintah. Pemerintah Orde Baru menyadari kebebasan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan media menjadi kekuatan oposisi yang membahayakan. Pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru memunculkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, kalangan aktivis banyak yang tidak setuju dengan pendekatan keamanan, karena bagi mereka pendekatan keamanan menyebabkan pemerintah orde baru melakukan tindakan represif kepada masyarakat, yang menimbulkan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Contohnya pada saat menjelang Sidang Umum MPR, 18 Maret 1978 mahasiswa dari berbagai daerah bergerak menuju Istana Negara di Jakarta Pusat dengan tujuan mendesak Soeharto agar tidak lagi melanjutkan kekuasaannya sebagai presiden. Soedomo pun melancarkan gebrakannya. Pertama-tama, ia menindaklanjuti sejumlah media massa nasional yang dituding membesar-besarkan aksi mahasiswa lewat pemberitaan. Koran – koran yang dihentikan

paksa itu baru bisa terbit kembali dengan syarat – syarat khusus. Selanjutnya, Soedomo mengerahkan tentara untuk menduduki beberapa universitas dan menahan 143 orang mahasiswa yang dianggap sebagai sumber kegaduhan. Beberapa orang di antaranya dibawa untuk diadili di meja hijau, kemudian dijebloskan ke penjara. Hal tersebut tentunya membuat aman kedudukan Soeharto dalam memimpin negara, bahkan hingga 20 tahun kedepan (Raditya, 2018).

Penulis sangat tertarik membahas Penerapan *Security Approach* oleh Panglima KOPKAMTIB Soedomo dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di DKI Jakarta Tahun 1978-1983, karena KOPKAMTIB sebagai lembaga militer merupakan suatu simbol kemerdekaan dan kedaulatan negeri. Militer merupakan unsur penting dalam sebuah negara yang berfungsi untuk menjaga pertahanan dan keamanan dari ancaman musuh yang berasal dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri. Kekuatan militer juga menjadi suatu tanda kehormatan atau kewibawaan sebuah negara dalam kancah internasional. Dan Soedomo merupakan pemimpin yang berhasil menerapkan *security approach* dalam KOPKAMTIB saat itu dan dipercaya sebagai tangan kanan Soeharto. Tema ini pastinya menarik dan penting bagi sejarah militer Indonesia khususnya masa Orde Baru.

Adapun dalam penulisan lain seperti dalam judul "Peranan Soedomo dalam Bidang Militer dan Politik pada Masa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1969-1998" yang ditulis oleh Hamdan Samendawai hanya membahas kiprah peranan Soedomo dalam bidang militer dan politik secara umum dan tidak spesifik soedomo dalam KOPKAMTIB. Dan juga dalam judul "Peran KOPKAMTIB dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional Pemerintah Orde Baru Tahun 1965-1988" yang

ditulis oleh Muhammad Farihi hanya membahas secara umum terkait peran KOPKAMTIB tanpa ada sub-bab khusus terkait peranan Soedomo. Selain itu penulisan mengenai *security approach* masih minim. Hal ini menunjukan bahwa kajian tentang Soedomo dalam *security approach* melalui KOPKAMTIB untuk menjaga keamanan dan ketertiban di DKI Jakarta tahun 1978-1983 masih minim dan bisa dikembangkan lebih luas.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Secara spasial penelitian ini akan membahas dinamika kepemimpinan LaksamanaSoedomo berfokus kepada wilayah DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan di Indonesia.

Secara temporal diawali dari tahun 1978 yakni ditunjuknya Laksamana Soedomo menjadi Panglima KOPKAMTIB 5 April 1978 oleh Presiden Soeharto, dan dibatasi tahun 1983 yakni berakhirnya jabatan Soedomo sebagai Panglima KOPKAMTIB.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana Riwayat Pendidikan dan kariri Panglima KOPKAMTIB Soedomo ?

b. Bagaimana Sejarah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban ?

c. Bagaimana Panglima KOPKAMTIB Soedomo dalam penerapan

Security Approach untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di DKI Jakarta 1978-1983 ?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekontruksi Pendekatan keamanan *(Security approach*) KOPKAMTIB yang diterapkan Panglima KOPKAMTIB Soedomo Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban di DKI Jakarta 1978 – 1983

b. Kegunaan

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, kegunaan penelitian ini yaitu :

- Kegunaan Teoritis : Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah referensikajian sejarah nasional Indonesia, khususnya pada bidang militer dan politik. Pada kajian sejarah politik dan militer terkait KOPKAMTIB peneliti menjelaskan tentang keterkaitan antara kepentingan negara untuk mewujudkan stabilitas nasional dengan militer sebagai penggerak dalam bidang pertahanan dan, pembangunan nasional masa Orde Baru, berfokus pada dinamika peranan Soedomo sebagai pemimpin KOPKAMTIB dalam menciptakan keamanan dan ketertiban melalui *security approach*.

- Kegunaan Praktis : Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi kajian oleh pemerintah mengenai kebijakan dan

upaya menjaga stabilitas keamanan masa Orde Baru, yang mungkin saja terjadi pola ancaman keamanan yang sama di kemudian hari. Serta bahan pengayaan dalam pembelajaran dan perkuliahan di prodi Pendidikan Sejarah, khususnya kajian sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Penelitian ini dapat juga digunakan sebagai bahan refrensi bagi pengembangan kepenulisan berikutnya.

c. Metode dan Bahan Sumber

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian sejarah atau historis. Yaitu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data dan penafsiran gejala peristiwa yang timbul dimasa lalu yang menggambarkan secara kritis seluruh kebenaran kejadian atau fakta untuk membantu mengetahui apa yang harus dikerjakan dimasa datang. Metode sejarah dilakukan dalam beberapa tahap :

- **Pemilihan Topik**

  Pemilihan topik diartikan sebagai proses dimana penulis menentukan topik yang akan di teliti. Pemilihan topik terbagi menjadi dua yaitu kedekatan emosional dan kedeketan intelektual. Kedekatan emosional yakni dikarenakan penulis gemar membaca sejarah militer dan mengamati perkembangan militer Indonesia. Kedekatan intelektual yakni penulis adalah mahasiswa sejarah yang mendalami sejarah militer di Indonesia. Hal tersebut yang mendorong penulis melakukan penelitian ini. Topik ini sangat

menarik karena KOPKAMTIB merupakan jantung kekuasaan Orde Baru yang mengoordinasi sejumlah badan intelejen, mulai dari Bakin sampai dengan intelejen dalam setiap bagian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Malahan pada kasus-kasus yang dianggap dapat menganggu stabilitas politik dan ekonomi, KOPKAMTIB bisa menerobos wewenang departemen sipil, bahkan wewenang angkatan bersenjata sekali pun. Dengan memperkerjakan personel militer terpercaya untuk melaksanakan tugas-tugas yang bertujuan politik dalam artian luas dan luar biasa, maka Kopkamtib merupakan inti pemerintah Indonesia pada masa hukum darurat perang yang permanen. Serta salah satu Panglimanya yang akan dibahas yaitu Soedomo yang sangat penting bagi Orde Baru, karena Soedomo memiliki loyalitas, integritas, kecerdasan, keyakinan dan daya tarik. Tetapi disamping kelima hal tersebut, yang paling penting bagi Presiden Soeharto yang ada pada diri Soedomo adalah Soedomo dinilai tidak memiliki ambisi yang besar apalagi untuk menjadi Presiden (Said, 2016)

- **Tahap Heuristik**

Dalam proses pengumpulan informasi atau pengumpulan sumber untuk penelitian sejarah yang dilakukan melalui seperangkat sumber primer seperti koran harian Belanda atau Nederlands Dagblad dengan judul Layanan Keamanan di

Indonesia Sedang di Tata Ulang yang terbit 1983 (*Veiligheidsdienst in Indonese wordt gereorganiseerd*).

pag. 3

Veiligheidsdienst in Indonesië wordt gereorganiseerd

JAKARTA (UPI) - Indonesië gaat zijn nationale veiligheidsdienst, beter bekend als de Kopkamtib, dit voorjaar reorganiseren teneinde de waakzaamheid in de campagne tegen „wetteloosheid" te vergroten, zo heeft de chef van Kopkamtib, admiraal Sudomo, bekendgemaakt.

Sudomo zei dat de veranderingen na de presidentsverkiezingen van begin maart zullen plaatsvinden. De veiligheidssituatie is veranderd, zei Sudomo terwijl hij min of meer stelde dat er geen belangrijke haarden van onrust meer zijn. „Maar we moeten waakzaam blijven en ons aanpassen aan de huidige toestand".

De veiligheidsdienst werd in 1965 opgericht, vlak na de mislukte aan communisten toegeschreven coup die het leger verijdelde en die Suharto aan de macht bracht. De Kopkamtib zette daarna de achtervolging tegen de communisten of hun sympathisanten in. Van hen kwamen er volgens westelijke schattingen 500.000 om het leven, terwijl er 1,5 miljoen vermeende rebellen, onder wie de „harde kern" van 70.000 mensen, gevangen werden genomen.

Nadat de Kopkamtib de communistische beweging een „kopje kleiner" had gekregen was het volgende doelwit het mohammedanse extremisme. Zo werd vorig jaar de leider van de „Imron groep" wegens 'subversieve actie' ter dood veroordeeld. Onlangs nog werd de campagne „Sikkel" gestart tegen de misdaad in met name Jakarta, tegen de achtergrond van de presidentsverkiezingen. Agenten van de dienst hebben nu het recht zonder een aanhoudingsbevel verdachten te fouilleren, te arresteren en gevangen te houden.

Gambarr 1. Koran Harian Belanda tentang Kopkamtib dari Nederlands Dagblad

Gambar 2. Koran Harian Indonesia terkait kondisi keamanan 1979

Surat kabar dari dalam negeri juga penulis gunakan contohnya adalah Berita Yudha, 20 Maret 1979 yang mendeskripsikan kondisi keamanan Jakarta pada saat Soeharto awal memimpin KOPKAMTIB.

Sumber sekunder salah satunya didapat dari judul skripsi "Peranan Soedomo dalam Bidang Militer dan Politik pada Masa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1969-1998" yang ditulis oleh Hamdan Samendawai, dalam sumber ini menjelaskan dinamika kepemimpinan Soedomo selain sebagai Panglima KOPKAMTIB, juga Wakil Panglima ABRI, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) hingga karier politiknya berakhir seiring dengan tumbangnya Orde Baru pada 1998. Serta studi pustaka terkait jurnal yang berkaitan dengan aspek kepemimpinan Soedomo sebagai Panglima KOPKAMTIB sebagai sumber sekunder.

- **Tahap Kritik**

Tahap kritik dilakukan dengan memverifikasi sumber untuk menguji keaslian dan kredibilitasnya. Kritik dilakukan dalam dua tahap yaitu eksternal yang merupakan kritik terhadap keaslian sumber meliputi aspek bahan pembuat sumber, pembuktian keaslian, dan waktu atau penanggalan. Lalu yang

kedua adalah kritik internal, yaitu kritik terhadap kredibilitas dengan menguji sumber baik secara benda, tulisan ataupun lisan. Contohnya dengan melakukan cek silang antara informan satu dengan informan yang lain. Contohnya saat membandingkan struktur hirarki Intelijen dari sumber luar yaitu "*After KOPKAMTIB: Indonesia's Intelegent and Security Aparatus" karya Richard Tanter, 1991".*

Bagan 1. Struktur Hierarki KOPKAMTIB dari Buku Tanter

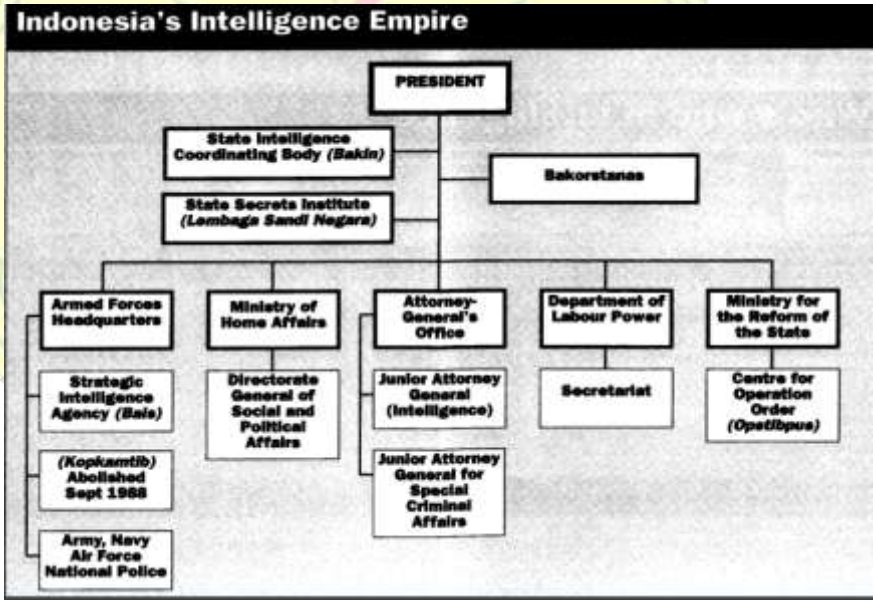

Penulis bandingkan dengan struktur organisasi KOPKAMTIB, yang terdapat pada judul "Lahirnya **KOPKAMTIB** dan Legitimasi Kebijakan Represif Terhadap Kelompok Pendukung Soekarno dan Mereka yang Dituduh Terlibat G**.** 30S" yang dimuat dalam koleksi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat yang terbit tahun 2014. Penulis melakukan cek silang antara informan satu dengan informan yang lain.

Bagan 2. Hirarki Kepemimpinan KOPKAMTIB

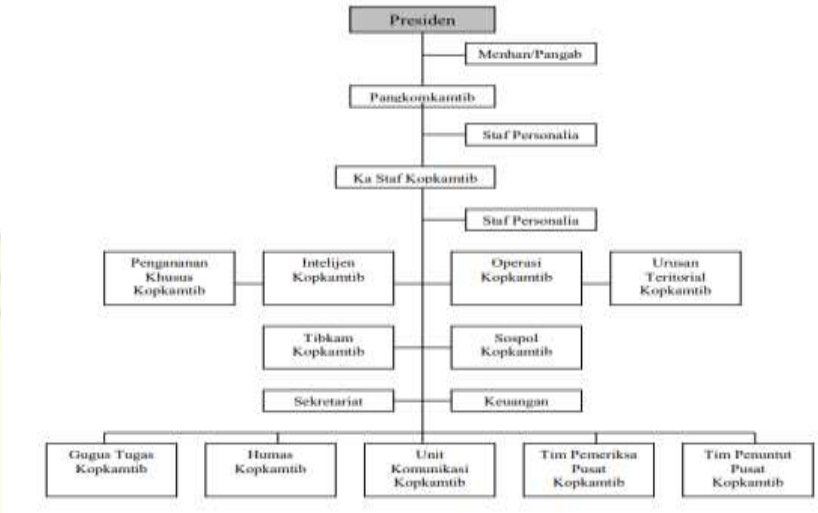

- **Tahap Interpretasi**

Penulis menganalisis dan mencoba untuk membandingkan fakta yang satunya dengan fakta yang lainnya sehingga fakta-fakta yang ada dapat dijadikan kesatuan yang masuk akal. interpretasi sebagai upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka merekonstruksi realitas masa lampau, memiliki dua makna. Pertama, interpretasi dalam upaya rekonstruksi sejarah masa lampau, berarti memberikan kembali relasi antar fakta-fakta. Fakta – fakta sebagai bukti – bukti yang pernah terjadi di masa lampau di interpretasi dengan mencari dan membuktikan relasi satu dengan lainnya, sehingga membentuk satu rangkaian

makna yang faktual dan logis dari kehidupan masa lampau suatu kelompok, masyarakat ataupun suatu bangsa. Kedua, interpretasi lebih dikaitkan dengan eksplanasi sejarah. Pada dasarnya suatu interpretasi lebih merujuk kepada argumentasi-argumentasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kausal. Dengan demikian terdapat dua relasi yaitu relasi kausal dan relasi nilai (Daliman, 2012).

- **Historiografi**

Penulisan sejarah berdasarkan sumber sumber yang telah ditemukan, dinilai, diseleksi dan dikritisi. Penulis memaparkan hasil penelitian secara deskriptif naratif. dalam melakukan penulisan sejarah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh penulis yaitu:

- **Seleksi**

Seleksi ini dilakukan terhadap fakta-fakta dan uraian fakta sejarah berdasarkan dua kriteria yaitu relevansi peristiwa dan kelayakan nya.

- **Imajinasi**

Menggunakan imajinasi dalam penulisan sejarah berarti berusaha untuk memperoleh kaitan dan mata rantai yang menghubungkan peristiwaperistiwa terpisah, kemudian membandingkannya dengan pengalamanpengalaman yang tersimpan dalam memori atau peristiwa-peristiwa masa lalu

Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa

yang sudah tertulis dan diterima orang.

- **Kronologi**

Berbeda dengan ilmu sosial lainnya dimana perubahan, diuraikan dengan sistematika perubahan ekonomi, perubahan masyarakat, perubahan politik dan perubahan kebudayaan. Dalam sejarah, perubahan sosial tersebut akan diurutkan berdasarkan kronologi nya (Herlina,2011).

C. Kerangka Analisis

Pengertian Security Approach adalah suatu pendekatan pertahanan keamanan dalam menyelenggarakan dan membina negara. Defenisi keamanan (security) dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu keadaan yang bebas dari segala bentuk ancaman, bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Dalam studi-studi keamanan (Security Studies), pendekatan atau paradigam dominan yang menjadi mainstream utama dalam studi-studi keamanan internasional adalah perspektif realis. Dalam perspektif ini, fokus konsep keamanan bersifat terbatas atau didefenisikan secara sempit, sebagaimana dikemukan oleh Stephen M.Walt, "security studies may be defined as the study of the threat, use and control of military force". Singkatnya, menurut Walt, studi keamanan merupakan studi mengenai fenomena perang. Pendekatan Walt tersebut mewakili perspektif realisme yang juga dikenal dengan traditional security (TS) atau conventional security (Waltz, 1991).

Dengan kata lain, ancaman keamanan tradisional (*traditional security*) ditafsirkan sebagai bentuk ancaman keselamatan negara pada aspek militer atau

ancaman fisik saja bersumber dari luar. Isu-isu keamanan non-tradisional terentang luas dalam berbagai area yang berbeda-beda namun saling terkait dan terkadang overlapping seperti ancaman keamanan lingkungan hidup *(environmental security*), keamanan pangan *(food security*), keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan energi (*energy security*), keamanan manusia (*human security*), keamanan maritim (*maritime security*) dan lain sebagainya. Kesemua isu-isu ini dinilai memiliki dampak serius terhadap semua level 1baik itu keamanan bagi manusia *(human security*), keamanan nasional (*national security*) (Sagena,2013).

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksut aman adalah bebas dari semua gangguan, bahaya, resiko, rasa takut dan dapat terlindungi. Dengan demikian aman bersangkut paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya,gangguan,rasa takut maupun risiko (Wawan,2016). Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

- **Security,** yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
- **Surety,** yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
- **Safety**, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
- **Peace**, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi

dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada (Rinawati, 2016).

Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan oeh masyarakat dalam hal pembangunan maupun bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Situasi kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motifasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Gangguan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban yang sering terjadi dapat dibagi menjadi 3 sebagai berikut :

- Gangguan Kamtibmas Konvensional, dalam arti merupakan gejala pathologis sosial yaitu semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin kebaikan, dan hukum formal. yang selalu melekat, tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat secara Universal.

- Gangguan Kamtibmas Konvensional Berdimensi Baru, dimana pola dasar atau pattern yang bersifat dasar adalah perilaku menyimpang yang konvensional tadi, namun dalam perkembangannya telah menunjukkan intensitas yang meningkat.

- Gangguan Kamtibmas sebagai dampak pembangunan nasional yang menunjukan ciri-ciri yang berbeda dengan kedua gangguan tersebut diatas baik dari segi motivasinya, fluktuasi ancaman, locus delictinya maupun dari segi korbannya (Irsan,1997).

Dalam pembahasan penulis akan menguraikan dinamika kepemimpinan Panglima KOPKAMTIB Soedomo, dimana dinamika diartikan suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut. Jika salah satu unsur sistem mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada unsur-unsur lainnya (Munir,2001). Dan kepemimpinan merupakan kebutuhan manusia yang dapat melengkapi segala keterbatasan kehidupan individu menuju suatu cita-cita kehidupan kolektif (Thoha,2017). Dinamika kepemimpinan berarti kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh faktor situasi yang berlaku di sebuah waktu dan tempat. Argumen ini selaras dengan hasil penelitian Fred Fiedler yang menjadi tesis utama teori kontingensi, bahwa kepemimpinan efektif tidak dapat berdiri sendiri melainkan ada pengaruh situasional bagi Soedomo dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui security approach (Rehardiningtyas, 2022).

Di era Orde Baru KOPKAMTIB berperan besar menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mengawasi masyarakat. Militer di era Orde baru memiliki kewenangan dalam menentukan layak dan tidak layak seorang menduduki jabatan pejabat negera, pemerintahan, DPR, diplomat. Pendekatan keamanan yang dilakukan oleh Soedomo dalam jabatanya di masa Orde Baru memunculkan pro

dan kontra dikalangan masyarakat, kalangan aktivis banyak yang tidak setuju dengan pendekatan keamanan yang dilakukan Soedomo, karena bagi mereka pendekatan keamanan Soedomo dalam KOPKAMTIB melakukan tindakan represif kepada masyarakat. Seperti tindakan represif KOPKAMTIB kepada mahasiswa dan pers saat Sidang Umum MPR, 18 Maret 1987.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa